



SIARAN PERS

Untuk segera disiarkan

59 Organisasi Massa Kirim Surat ke Kementerian Keuangan untuk Mendukung Kenaikan dan Penyederhanaan Golongan Tarif Cukai Rokok

29 Agustus 2022 - Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) bekerja sama dengan 59 organisasi massa menyelenggarakan konferensi pers yang bertajuk “Dukungan 59 Organisasi Massa pada Kenaikan Cukai Hasil Tembakau untuk Kendali Konsumsi”. Dalam konferensi pers tersebut, organisasi massa menyampaikan urgensi kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan penyederhanaan strata tarif cukai rokok sebagai strategi yang paling efektif untuk mengendalikan konsumsi rokok di Indonesia. Salah satu pernyataan sikap berbagai organisasi massa ini, yaitu mendorong agar harga rokok menjadi semakin mahal agar dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat baik anak-anak maupun masyarakat miskin dari keterjangkauan rokok.

Rokok terbukti berdampak negatif terhadap kesehatan individu, menurunkan kesejahteraan keluarga, dan menjadi beban bagi negara. Studi PKJS-UI (2019) menunjukkan bahwa konsumsi rokok dalam rumah tangga mengakibatkan risiko *stunting* pada anak. Harga rokok yang masih murah menjadi salah satu penyebab prevalensi perokok di Indonesia masih belum terkendali. Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2018) menunjukkan jumlah perokok dewasa di Indonesia masih sangat tinggi (62,9%), termasuk prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun yang meningkat dari 7,2% pada 2013 menjadi 9,1% pada 2018.

Berdasarkan hasil studi Dartanto *et al.* (2020), efek harga (*price effect*) dan efek teman sebaya (*peer effect*) berhubungan dengan peluang seorang anak menjadi perokok. Efek harga rokok murah ini menjadikan anak-anak maupun kelompok masyarakat pra-sejahtera tidak berhenti merokok walaupun dalam kondisi perekonomian yang sedang sulit. Apalagi, saat ini rokok masih bisa dibeli secara batangan/ketengan. Anak usia sekolah sangat mudah membeli rokok batangan karena sebanyak 61,2% warung rokok berada pada radius ≤ 100 meter di sekitar area sekolah, dengan harga rokok batangan yang dijual pun masih terjangkau oleh uang saku anak, yaitu pada kisaran Rp1.500 per batang. Pemerintah maupun masyarakat perlu segera menentukan sikap terkait harga rokok yang masih sangat murah di Indonesia

Risky K. Hartono, Ph.D (PKJS-UI) menyampaikan bahwa kenaikan tarif cukai rokok

dapat menjadikan harga rokok menjadi mahal, sehingga menjauhkan akses untuk anak dan masyarakat miskin. Risky juga menambahkan bahwa Pemerintah telah menyederhanakan strata cukai rokok dari 10 menjadi 8 golongan pada 2021. Namun, struktur tarif cukai rokok tersebut masih berjenjang dan rumit. “Rokok golongan 2 yang memiliki tarif cukai lebih murah dibandingkan dengan rokok golongan 1. Ini menjadikan adanya pilihan harga rokok yang lebih murah, sehingga harga rokok di pasaran menjadi bervariasi. Perokok juga dapat beralih ke rokok golongan 2 atau 3 karena memiliki selisih harga yang lebih murah dibandingkan rokok golongan 1 dan tidak memilih berhenti merokok. Kondisi ini juga belum sejalan dengan tujuan dari penenaan cukai pada rokok sebagai pengendalian konsumsi rokok,” tambah Risky.

Tulus Abadi (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) menyampaikan bahwa pemerintah saat ini memiliki target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk menurunkan prevalensi perokok anak dari 9.1% menjadi 8.7% di tahun 2024. “Akan tetapi, program mulia pemerintah tersebut tidak akan tercapai apabila tidak ada upaya konkrit dari pemerintah salah satunya dengan menaikkan cukai rokok. Cukai merupakan salah satu instrumen perlindungan konsumen dari zat adiktif tembakau. Kebijakan Pemerintah menaikkan cukai rokok akan membuat harga rokok menjadi mahal dan sulit diakses oleh anak-anak maupun masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan visi pemerintah yaitu menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia/SDM Indonesia yang unggul. Selain itu, menaikkan cukai rokok juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mengurangi pengeluaran di bidang kesehatan kedepannya,” jelas Tulus.

Menyambung pernyataan Tulus terkait pengeluaran di bidang kesehatan, **Esti Nurjadin, S.H., M.Kn (Yayasan Jantung Indonesia)**, mewakili organisasi massa di bidang kesehatan menambahkan bahwa kebiasaan merokok merupakan salah satu faktor risiko penyakit jantung. Penyakit jantung dan kardiovaskular menjadi penyebab kematian terbanyak kedua di Indonesia setelah stroke, bahkan menjadi penyakit dengan klaim pembayaran BPJS tertinggi selama tahun 2018 yaitu sebesar 9,3 triliun. “Prevalensi penderita penyakit jantung juga meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap biaya kesehatan yang semakin naik yang harus ditanggung pemerintah. Data dari CISDI tahun 2021 juga membuktikan bahwa negara harus menanggung beban ekonomi dengan biaya kesehatan sebesar Rp15,5 Triliun pada tahun 2019 akibat penyakit karena rokok. Dari studi yang sama, alokasi maksimum Pajak Rokok Daerah dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau/DBH CHT untuk pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional/JKN hanya sebesar Rp7,4 triliun. Artinya, kebijakan alokasi tersebut belum cukup untuk menanggung biaya kesehatan akibat penyakit terkait rokok,” tambah Esti.

Untuk itu, **dr. Hasbullah Thabrany, M.PH, Dr.PH (Komnas PT)** menyampaikan kenaikan cukai rokok merupakan *win-win solution* untuk menekan konsumsi sekaligus pendapatan negara, utamanya merupakan salah satu cara pemerintah memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia. Mewakili 59 organisasi massa, dr. Hasbullah memberikan harapannya kepada Pemerintah untuk:

- 1) Pemerintah di tahun 2023 dapat menaikkan cukai hasil tembakau (CHT)/cukai rokok sebesar 20% agar harga rokok tak lagi terjangkau terutama oleh anak-anak dan masyarakat miskin;
- 2) Kenaikan CHT yang diiringi dengan penyederhanaan golongan tarif yang agresif hingga 5 golongan di tahun 2023 dan berkurang di tahun-tahun berikutnya untuk memastikan efektivitas efek kenaikan tarif CHT;
- 3) Pemerintah membuat peraturan CHT yang bersifat jangka panjang dan mengikat untuk memastikan target penurunan prevalensi perokok anak benar-benar tercapai;
- 4) Mitigasi risiko tetap dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada petani dan pekerja yang terdampak.

-S E L E S A I-

Kontak:

Sekretariat PKJS-UI: csgs.pkjs@ui.ac.id

Tentang Pusat Kajian Jaminan Sosial, Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (PKJS-UI): Institusi yang bergerak pada pelatihan, konsultasi, dan penelitian seputar Jaminan Sosial secara luas termasuk menangani isu ekonomi dan kesehatan, untuk berkontribusi pada kesejahteraan rakyat.

W. <http://pkjsui.org/>

Tentang Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT): Merupakan organisasi koalisi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang penanggulangan masalah konsumsi produk tembakau, didirikan pada 27 Juli 1998 di Jakarta, beranggotakan 23 organisasi dan perorangan, terdiri dari organisasi profesi kesehatan, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli akan bahaya produk tembakau bagi kehidupan, khususnya bagi generasi muda dan keluarga miskin.

W. komnaspt.or.id

59 Organisasi Massa yang Turut Mendukung:

No	Nama Organisasi
1	9cm
2	ADINKES (Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia)
3	Aksi Kebajikan #SmokeFreeCampus UIN Jakarta
4	Aliansi PTM Indonesia
5	AMKRI (Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia)
6	BEM FKM UI (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Univ Indonesia)
7	Center For NCDs Tobacco Control and Lung Health (Udayana Central)
8	CHED (Center of Human & Economic Development)
9	CIMSA (Center for Indonesian Medical Students Activities)
10	FAKTA
11	Green Crescent Indonesia
12	Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia - Presidium Pusat
13	IAKMI Jawa Timur
14	IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) - Pengurus Pusat
15	IDI (Ikatan Dokter Indonesia)
16	IEKI (Ikatan Ekonom Kesehatan Indonesia)
17	Ikatan Pelajar Muhammadiyah – Pimpinan Pusat
18	IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama)
19	ISMAFARSI (Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia)
20	ISMKI (Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia)
21	ISMKMI (Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia)
22	IYCTC (Indonesian Youth Council for Tobacco Control)
23	JP3T (Jaringan Perempuan Peduli Pengendalian Tembakau)
24	JSTT (Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau)
25	Keren Tanpa Rokok
26	Klub Jantung Remaja
27	Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT)
28	LDUI (Lembaga Demografi Univ Indonesia)

29	LPAI (Lembaga Perlindungan Anak Indonesia)
30	Muhammadiyah Steps
31	Muhammadiyah Tobacco Control Center
32	No Tobacco Community
33	PAMI (Pergerakan Anggota Muda - Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia - Pengurus Nasional)
34	PAPDI (Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia)
35	PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia)
36	PDPI (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia)
37	Pemuda Penggerak
38	PERKI (Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia)
39	PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia)
40	POI (Perkumpulan Onkologi Indonesia)
41	PPTI (Perhimpunan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia)
42	Prakarsa
43	PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia) - Pengurus Pusat
44	Pusaka Indonesia
45	Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI)
46	PWEI (Perkumpulan Wicara Esofagus Indonesia)
47	RAYA Indonesia
48	SFA for Tobacco Control
49	Smoke Free Jakarta
50	Tata Muda
51	TCSC IAKMI (Tobacco Control Support Center - Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia)
52	TenD For Youth
53	Toco Ranger
54	YASIN JAYAPURA (Yayasan Abdi Sehat Indonesia)
55	Yayasan KAKAK (Kepedulian untuk Anak)
56	Yayasan Lentera Anak
57	YJI (Yayasan Jantung Indonesia)
58	YKI (Yayasan Kanker Indonesia)
59	YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)